

“

“Memahami dinamika kekuasaan, pasar, dan masyarakat untuk menavigasi perubahan menuju masa depan yang berkeadilan.”

”



MEMBACA EKONOMI POLITIK KONTEMPORER

DALAM DUNIA YANG SEDANG BERUBAH

OLEH
RUDY C TARUMINGKENG



PERSPEKTIF GLOBAL
Memahami arah perubahan ekonomi dan geopolitik dunia



ANALISIS MENDALAM
Membedah relasi kekuasaan, pasar, dan kebijakan



BERORIENTASI PADA MANUSIA
Menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan



RELEVAN UNTUK MASA DEPAN
Strategi dan gagasan untuk menghadapi ketidakpastian

MEMBACA MASA KINI • MEMAHAMI KEKUASAAN • MERANCANG MASA DEPAN

Rudy C Tarumingkeng: **Membaca Ekonomi Politik Kontemporer dalam
Dunia yang Sedang Berubah**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

8 April 2026

MEMBACA EKONOMI POLITIK KONTEMPORER DALAM DUNIA YANG SEDANG BERUBAH

Abstrak

Makalah ini membahas bagaimana ekonomi politik kontemporer harus dibaca dalam kerangka dunia yang sedang berubah secara cepat, tidak linear, dan penuh ketidakpastian. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa ekonomi modern tidak pernah berdiri terpisah dari politik; pasar selalu dibentuk oleh relasi kekuasaan, institusi, konflik geopolitik, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perlambatan pertumbuhan global, lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, kebangkitan geoeconomics, konsentrasi kekuasaan digital, serta kemunduran kualitas demokrasi telah membentuk lanskap baru yang berbeda dari optimisme globalisasi era sebelumnya. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, sementara WTO menilai tarif yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan telah cukup untuk menurunkan proyeksi perdagangan barang dunia 2025 menjadi kontraksi 0,2 persen. Pada saat yang sama, V-Dem menunjukkan bahwa hampir tiga perempat penduduk dunia kini hidup dalam rezim autokratis, sedangkan UNDP memperingatkan bahwa kenaikan HDI global berada pada laju

terendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu. Makalah ini berargumen bahwa membaca ekonomi politik kontemporer berarti memahami bahwa persoalan kesejahteraan, legitimasi, dan pembangunan kini tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka pertumbuhan, melainkan harus melalui analisis atas hubungan antara negara, pasar, teknologi, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tantangannya adalah membangun negara yang strategis namun akuntabel, pasar yang dinamis namun adil, dan masyarakat yang adaptif namun tetap terlindungi. ([IMF](#))

Kata kunci: *ekonomi politik, kekuasaan, pasar, demokrasi, geoeconomics, AI, Indonesia*

Membaca Ekonomi Politik Kontemporer dalam Dunia yang Sedang Berubah

1. Pendahuluan

Membaca ekonomi politik kontemporer menuntut keberanian untuk meninggalkan cara pandang lama yang menganggap ekonomi dan politik sebagai dua wilayah yang terpisah. Dalam praktik sejarah maupun kenyataan mutakhir, keduanya justru saling membentuk. Harga energi dipengaruhi perang dan blokade. Arus perdagangan dipengaruhi tarif, sanksi, dan aliansi. Investasi dipengaruhi kepercayaan pasar, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas rezim, dan arah kebijakan industri. Bahkan lalu lintas informasi yang memengaruhi perilaku pemilih dan konsumen kini berada dalam kendali infrastruktur digital yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, membaca ekonomi politik hari ini berarti membaca kekuasaan yang bekerja melalui anggaran, regulasi, teknologi, narasi publik, dan institusi.

Konteks global memperlihatkan bahwa kita sedang berada dalam masa transisi yang tidak tenang. IMF menggambarkan 2025 sebagai tahun yang "fluida dan volatil," dengan berita perdagangan mendominasi persepsi tentang masa depan ekonomi dunia. Dalam kerangka yang lebih konkret, IMF memproyeksikan pertumbuhan global turun dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026. WTO bahkan lebih tajam dalam menekankan dampak kebijakan: setelah menyesuaikan proyeksi terhadap tarif baru dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, lembaga itu memperkirakan perdagangan barang dunia pada 2025 justru berkontraksi 0,2 persen. Dengan demikian, perubahan yang kita hadapi bukan sekadar siklus ekonomi biasa, melainkan perubahan dalam aturan permainan global itu sendiri. ([IMF](#))

Pada April 2026, kerentanan ini bahkan memperoleh ilustrasi yang sangat nyata. IMF Managing Director Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah dan gangguan pasokan energi akan mendorong harga lebih tinggi serta memperlambat pertumbuhan global. Di Indonesia, tekanan global ini ikut tercermin ketika rupiah menyentuh rekor terendah dan Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa ekonomi politik kontemporer bukan topik abstrak; ia hadir sangat dekat dalam kurs, harga pangan, ongkos logistik, dan rasa aman rumah tangga. ([Reuters](#))

Makalah ini disusun sebagai kajian pustaka deskriptif-kritis berbasis laporan lembaga internasional dan sumber resmi nasional. Tujuannya bukan semata-mata memaparkan data, melainkan membangun pembacaan konseptual tentang bagaimana kekuasaan, pasar, dan masyarakat saling berkelindan dalam dunia yang sedang berubah. Dengan kerangka itu, pertanyaan utama yang diajukan ialah: bagaimana transformasi global hari ini mengubah hubungan antara negara, pasar, dan warga; dan pelajaran apa yang dapat ditarik untuk konteks Indonesia?

2. Kerangka Baca: Ekonomi Politik sebagai Analisis Relasi Kekuasaan

Pendekatan ekonomi politik berangkat dari asumsi bahwa pasar tidak pernah sepenuhnya otonom. Ia bergantung pada hukum, infrastruktur, kapasitas fiskal, legitimasi politik, dan kestabilan sosial. Karena itu, pertanyaan pokok dalam ekonomi politik bukan hanya "berapa pertumbuhan ekonomi," melainkan juga "siapa yang mendapat manfaat," "siapa yang menanggung biaya," dan "siapa yang memiliki kuasa untuk menetapkan aturan." Dalam dunia yang berubah cepat, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi makin penting karena sumber kekuasaan tidak lagi hanya terletak pada negara teritorial, tetapi juga pada perusahaan teknologi, jaringan keuangan, sistem pembayaran, rantai pasok, dan tata kelola data.

Kerangka ini juga membantu kita melihat bahwa perubahan ekonomi kontemporer tidak bisa direduksi menjadi soal efisiensi. Kebijakan industri, kontrol ekspor, proteksi teknologi, subsidi energi, atau pembatasan data lintas batas sering kali disusun bukan semata untuk meningkatkan produktivitas, tetapi untuk mengamankan posisi strategis. WTO secara eksplisit menegaskan bahwa tarif yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan telah menjadi penekan utama perdagangan global. Artinya, keputusan ekonomi utama kini semakin dipandu oleh pertimbangan kekuasaan dan keamanan, bukan hanya keunggulan komparatif.

Dalam makna yang lebih luas, ekonomi politik kontemporer juga harus dibaca sebagai kajian mengenai legitimasi. Sebuah sistem ekonomi dapat tumbuh, tetapi bila pertumbuhan itu tidak menghasilkan rasa keadilan, ia akan memicu kemarahan sosial. Sebuah negara dapat bertindak tegas, tetapi bila tindakannya tidak akuntabel, ia berpotensi bergeser menjadi alat konsentrasi kuasa. Sebuah teknologi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi bila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada segelintir aktor, maka teknologi itu menjadi saluran reproduksi ketimpangan. Karena itu, hubungan antara pasar dan kekuasaan selalu harus dibaca bersama dengan pertanyaan moral dan institusional.

3. Dunia yang Sedang Berubah: Fragmentasi, Volatilitas, dan Geoeconomics

Salah satu ciri paling menonjol dari ekonomi politik mutakhir ialah pergeseran dari globalisasi berbasis efisiensi menuju globalisasi berbasis ketahanan dan kepentingan strategis. IMF mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan diasumsikan tetap tinggi sepanjang 2025 dan 2026. WTO menyatakan secara lebih tegas bahwa tarif-tarif yang secara historis tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan akan menekan perdagangan dunia, dan bahwa tanpa kombinasi dua faktor tersebut, pertumbuhan perdagangan barang dunia seharusnya bisa jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, pasar global saat ini bergerak bukan di atas landasan kepastian, melainkan di bawah bayang-bayang rivalitas strategis. ([IMF](#))

Geoeconomics adalah bahasa yang paling tepat untuk menggambarkan situasi ini. Negara-negara besar menggunakan instrumen ekonomi—tarif, sanksi, pembatasan teknologi, mineral kritis, investasi infrastruktur, akses energi, dan pengendalian rantai pasok—untuk mencapai tujuan politik. Di masa lalu, banyak ekonom berasumsi bahwa integrasi pasar akan mendorong konvergensi dan perdamaian. Kini kita justru melihat bahwa interdependensi dapat dipersenjataikan. Ketergantungan pada chip, cloud, pelayaran, pembayaran internasional, dan data dapat menjadi sumber tekanan politik. Itulah sebabnya dunia saat ini tidak kembali ke nasionalisme ekonomi klasik, tetapi bergerak menuju ekonomi yang tetap saling terhubung namun makin bersyarat secara geopolitik.

WTO memberi gambaran kuantitatif atas perubahan tersebut. Perdagangan barang dunia yang tumbuh 2,9 persen pada 2024 diperkirakan berubah menjadi kontraksi 0,2 persen pada 2025 setelah penyesuaian terhadap tarif baru dan ketidakpastian kebijakan. Dalam skenario yang lebih buruk, jika tarif resiprokal diberlakukan dan ketidakpastian meluas ke hubungan dagang non-AS, WTO memperkirakan perdagangan barang dunia bisa turun 1,5 persen pada 2025. Di sini tampak jelas bahwa dunia usaha tidak

hanya merespons harga dan permintaan, tetapi juga ekspektasi atas keputusan politik.

Implikasinya luas. Perusahaan menata ulang strategi investasi; negara memperkuat kebijakan industri; dan kawasan-kawasan regional berusaha membangun ketahanan pasokan. Dalam jangka pendek, perubahan ini dapat meningkatkan biaya. Dalam jangka menengah, ia bisa menciptakan arsitektur ekonomi baru yang lebih tersegmentasi: blok teknologi, blok energi, dan blok perdagangan. Dalam jangka panjang, pertanyaannya menjadi normatif: apakah dunia akan membangun keteraturan baru yang tetap kooperatif, atau justru tergelincir pada fragmentasi permanen?

4. Negara dan Kembalinya Kekuasaan Strategis

Dalam ekonomi politik kontemporer, negara tidak menghilang; justru ia kembali sebagai aktor sentral. Hanya bentuk kehadirannya yang berubah. Negara hari ini tidak sekadar mengatur pajak, inflasi, dan belanja publik, tetapi juga menentukan sektor mana yang strategis, teknologi mana yang harus dilindungi, data mana yang boleh berpindah lintas batas, dan rantai pasok mana yang harus diamankan. IMF menunjukkan bahwa perubahan prioritas kebijakan di Amerika Serikat dan penyesuaian kebijakan di negara lain menjadi faktor penting yang membentuk dinamika ekonomi global pada 2025. Ini memperlihatkan bahwa ekonomi dunia sangat dipengaruhi oleh keputusan negara-negara besar. ([IMF](#))

Namun kembalinya negara bukan berarti semua persoalan selesai. Negara yang kuat tidak selalu berarti negara yang efektif. Di satu sisi, dunia yang makin tidak pasti memang membutuhkan kapasitas negara untuk membangun infrastruktur, menjaga stabilitas makro, melindungi kelompok rentan, dan mendorong industrialisasi baru. Di sisi lain, negara yang terlalu dominan tanpa akuntabilitas berisiko berubah menjadi distributor rente dan penjaga privilese. Oleh sebab itu, kualitas institusi menjadi pembeda utama antara negara pembangunan dan negara predatis.

Masalahnya, banyak negara masuk ke era geoeconomics dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang tidak seimbang. UNDP menekankan bahwa jalur pembangunan yang dulu mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan melalui manufaktur dan ekspor kini makin menyempit. Tekanan pembiayaan, otomasi, dan tensi perdagangan membuat banyak negara berkembang kehilangan salah satu tangga klasik menuju kemakmuran. Dalam situasi demikian, negara memang perlu lebih aktif, tetapi aktivitas itu harus cerdas, selektif, dan terbuka pada evaluasi.

Bahkan dari sudut pandang bank sentral, politik kini tak bisa dipisahkan dari manajemen ekonomi. Sebuah survei yang dilaporkan Reuters menunjukkan bahwa hampir 70 persen bank sentral menempatkan ketegangan geopolitik sebagai risiko global utama, melonjak tajam dibanding beberapa tahun sebelumnya. Artinya, stabilitas ekonomi makro semakin sulit dibaca hanya lewat indikator tradisional seperti inflasi dan suku bunga; ia kini dipengaruhi secara langsung oleh konflik, perang dagang, dan ketidakpastian strategis. ([Reuters](#))

5. Pasar, Ketimpangan, dan Masyarakat yang Gelisah

Bagi masyarakat, perubahan global sering kali tidak muncul pertama-tama dalam wacana akademik, melainkan dalam pengalaman sehari-hari: pekerjaan yang tidak pasti, harga yang mudah bergejolak, perumahan yang makin mahal, dan layanan publik yang terasa tertinggal dari kompleksitas zaman. Di sinilah ekonomi politik memperlihatkan sisi manusianya. Pertumbuhan dapat tetap terjadi, tetapi kualitas hidup belum tentu membaik dengan kecepatan yang sama.

ILO melaporkan bahwa pada 2024 pertumbuhan lapangan kerja global hanya cukup untuk mengikuti pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran global bertahan di 5 persen. Namun pengangguran kaum muda tetap tinggi di 12,6 persen. ILO juga menegaskan bahwa pekerjaan informal dan working poverty telah kembali ke tingkat pra-pandemi, dan negara-negara berpendapatan rendah menghadapi

tantangan paling berat dalam menciptakan pekerjaan yang layak. Dengan kata lain, masalah utama pasar tenaga kerja global bukan hanya kekurangan pekerjaan, tetapi kekurangan pekerjaan yang bermutu dan aman. ([International Labour Organization](#))

Pada tingkat yang lebih dalam, UNDP menunjukkan bahwa pembangunan manusia global sedang mengalami perlambatan serius. Nilai HDI global memang diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada 2024, tetapi kenaikannya adalah yang paling rendah sejak pencatatan dimulai 35 tahun lalu. Lebih mengkhawatirkan lagi, kesenjangan antara negara ber-HDI sangat tinggi dan rendah, yang selama beberapa dekade menyempit, justru melebar kembali selama empat tahun terakhir. Di sini terlihat bahwa dunia yang tampak modern dan berteknologi tinggi belum tentu menjadi dunia yang lebih setara.

Dari perspektif sosial-politik, situasi ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai masyarakat yang gelisah. Masyarakat tetap hidup di tengah pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan itu tidak otomatis menghadirkan rasa aman. Ketika pekerjaan makin fleksibel namun perlindungan tidak ikut fleksibel, ketika teknologi mempercepat produktivitas namun menekan daya tawar pekerja, dan ketika inflasi pangan atau energi dapat melonjak akibat perang yang jauh dari rumah, maka warga mulai merasakan jarak antara statistik makro dan kenyataan hidup. Jarak inilah yang sering menjadi bahan bakar populisme dan politik kemarahan.

Dalam konteks itu, pasar tidak boleh dibaca hanya sebagai mekanisme alokasi sumber daya. Pasar juga merupakan arena distribusi risiko. Pertanyaan utamanya menjadi: siapa yang paling tahan terhadap guncangan? Rumah tangga kaya bisa menyerap inflasi dan volatilitas lebih mudah. Korporasi besar dapat melakukan hedging, diversifikasi, dan lobi kebijakan. Sebaliknya, pekerja informal, petani kecil, dan kelas menengah rentan harus menyerap dampak paling langsung dari perubahan global.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang efisiensi pasar harus disertai pembicaraan tentang perlindungan sosial, kualitas kerja, dan daya tahan sosial.

6. Teknologi Digital, AI, dan Reorganisasi Kuasa

Tidak ada perubahan yang lebih menentukan bagi ekonomi politik kontemporer selain digitalisasi dan kebangkitan AI. Teknologi ini sering dipresentasikan sebagai mesin produktivitas baru, dan memang ada dasar kuat untuk optimisme tersebut. Bank Dunia menegaskan bahwa AI sedang membentuk ulang cara orang belajar, bekerja, dan hidup, serta berpotensi memperluas akses pengetahuan, meningkatkan produktivitas, dan membuka pasar baru. Namun laporan yang sama juga menekankan bahwa manfaat AI tidak akan menyebar dengan sendirinya; ia membutuhkan fondasi yang kuat dan kebijakan yang disengaja. ([World Bank](#))

Bank Dunia menyusun apa yang disebut fondasi “4Cs”: connectivity, compute, context, dan competency. Connectivity berarti infrastruktur digital, energi, dan akses perangkat yang andal. Compute merujuk pada chip, server, pusat data, dan layanan cloud yang menjadi “listrik baru” bagi era AI. Context berarti data dan konten lokal yang relevan agar AI tidak hanya menyalin realitas negara maju. Competency berarti keterampilan digital yang memungkinkan masyarakat mengadopsi, menyesuaikan, dan mengembangkan AI. Pesannya sangat penting: AI bukan hanya soal aplikasi, tetapi soal struktur kemampuan nasional. ([World Bank](#))

Pada saat yang sama, AI juga menghadirkan masalah konsentrasi kekuasaan yang sangat serius. UNCTAD memperkirakan nilai pasar AI dapat mencapai US\$4,8 triliun pada 2033. Namun lembaga yang sama memperingatkan bahwa manfaat AI sangat terkonsentrasi. Seratus perusahaan, terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok, menyumbang 40 persen belanja R&D korporasi global, dan 118 negara—sebagian besar di Global South—tidak hadir dalam diskusi utama tata kelola AI. Ini berarti AI tidak netral secara geopolitik; ia muncul dari geografi kekuasaan tertentu

dan cenderung memperkuat aktor yang sudah lebih dulu dominan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Kesenjangan itu juga terlihat dalam data Bank Dunia. Di luar China dan India, negara berpendapatan rendah dan menengah hanya menyumbang 4 persen startup AI, kurang dari 1 persen pendanaan startup AI, paten GenAI, dan model AI penting, padahal kelompok negara itu mewakili 48 persen populasi dunia. Ironisnya, lebih dari 40 persen lalu lintas global ChatGPT pada pertengahan 2025 justru berasal dari negara berpendapatan menengah, termasuk Indonesia. Artinya, banyak negara berkembang telah menjadi pengguna aktif AI, tetapi belum menjadi produsen utama nilai, model, dan infrastruktur. ([World Bank](#))

Dimensi lain yang sangat penting ialah struktur pasar digital. Analisis Bank Dunia mengenai platform digital menunjukkan bahwa lalu lintas data internet dunia sangat terkonsentrasi pada sedikit perusahaan. Enam perusahaan berbasis di AS menghasilkan lebih dari 40 persen arus data internet global, dan di sampel 17 negara berpendapatan rendah-menengah, sekitar 60 persen dari 25 situs teratas dimiliki lima perusahaan AS. Laporan yang sama menegaskan bahwa dalam pasar digital, perlindungan persaingan tidak cukup hanya berbasis harga, tetapi juga harus memperhitungkan kualitas, privasi, dan perlindungan data pribadi. Ini adalah pergeseran besar dalam cara kita memahami pasar: kekuasaan tidak hanya terletak pada kepemilikan modal, tetapi juga pada kepemilikan arsitektur perhatian, data, dan akses. ([World Bank](#))

Karena itu, ekonomi politik digital bukan hanya tentang inovasi, melainkan tentang tata kelola. Siapa yang mengendalikan cloud? Siapa yang melatih model besar? Siapa yang memiliki data lokal? Siapa yang boleh mengaudit algoritma? Siapa yang memungut rente dari ekosistem digital? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi semakin tergantung pada keputusan politik tentang infrastruktur dan regulasi teknologi.

7. Demokrasi, Legitimasi, dan Krisis Representasi

Pembacaan ekonomi politik kontemporer tidak akan lengkap tanpa memerhatikan kondisi demokrasi. Dalam teori modernisasi klasik, pertumbuhan ekonomi sering diasumsikan berjalan searah dengan penguatan demokrasi. Realitas mutakhir menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. V-Dem melaporkan bahwa dunia pada akhir 2025 terdiri dari 92 autokrasi dan 87 demokrasi, dengan 74 persen populasi dunia hidup dalam rezim autokratis. Untuk warga rata-rata dunia, tingkat demokrasi kini kembali ke level sekitar 1978. Bahkan hanya 7 persen penduduk dunia yang hidup dalam demokrasi liberal. (v-dem.net)

Data tersebut penting bukan hanya sebagai statistik politik, tetapi sebagai indikator masalah legitimasi. Ketika warga merasa institusi demokrasi tidak mampu menahan kenaikan harga, menyediakan pekerjaan bermutu, atau melindungi ruang publik dari manipulasi digital, maka demokrasi prosedural kehilangan daya meyakinkannya. V-Dem juga menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi adalah aspek demokrasi yang paling banyak diserang, memburuk di 44 negara pada 2025. Ini berarti masyarakat tidak hanya menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga penyempitan ruang untuk mengartikulasikan kritik dan tuntutan. (v-dem.net)

Di sinilah politik populis dan otoritarian memperoleh lahan subur. Ketika sistem yang kompleks menghasilkan rasa tidak aman, banyak warga tergoda pada narasi yang sederhana: bangsa sedang dirugikan pihak luar; elite lama terlalu lemah; pasar harus dikendalikan; media harus ditertibkan; oposisi dianggap penghambat; teknologi harus dijadikan alat pengawasan demi stabilitas. Sebagian respons ini mungkin mengandung elemen kebenaran—misalnya tentang perlunya kebijakan industri atau kedaulatan digital—tetapi tanpa checks and balances, solusi itu mudah bergeser menjadi konsentrasi kuasa yang merusak.

Karena itu, tantangan ekonomi politik kontemporer bukan memilih antara demokrasi atau efektivitas negara, melainkan membangun negara yang

efektif sekaligus demokratis. Negara perlu cukup kuat untuk bertindak di era fragmentasi global, namun juga cukup terbuka untuk dikoreksi. Tanpa kapasitas negara, demokrasi terlihat lemah; tanpa demokrasi, kapasitas negara kehilangan koreksi moral dan institusionalnya.

8. Indonesia dalam Dunia yang Sedang Berubah

Indonesia memberikan contoh menarik tentang bagaimana negara berkembang besar mencoba bertahan, tumbuh, dan menyesuaikan diri di tengah perubahan global. Menurut BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, dan pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan. Bank Indonesia pada Februari 2026 juga memproyeksikan pertumbuhan 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7 persen. Data ini menunjukkan bahwa dibanding banyak negara lain, Indonesia masih memiliki jangkang domestik yang cukup kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi sosial, ada perkembangan positif yang patut dicatat. BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Pada saat yang sama, gini ratio turun menjadi 0,363, lebih rendah daripada Maret 2025 maupun September 2024. Namun data yang sama juga memperlihatkan bahwa kemiskinan perdesaan, sebesar 10,72 persen, masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang 6,60 persen. Dengan demikian, perbaikan agregat tidak boleh menutupi kenyataan bahwa dualisme spasial dan kerentanan struktural masih kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam perspektif ekonomi politik, Indonesia menghadapi setidaknya empat agenda besar. Pertama, memperkuat ketahanan domestik tanpa terjebak pada proteksionisme yang sempit. Kedua, mendorong hilirisasi dan transformasi industri tanpa membiarkan rente dan konsentrasi manfaat hanya dinikmati kelompok tertentu. Ketiga, membangun fondasi digital dan AI agar Indonesia tidak berhenti sebagai pasar pengguna.

Keempat, menjaga kualitas demokrasi dan kapasitas institusi agar kebijakan strategis tidak berubah menjadi alat patronase.

Perkembangan April 2026 terkait rupiah memberi pengingat penting bahwa keterhubungan global selalu membawa transmisi risiko. Ketika kurs bergejolak akibat sentimen geopolitik global, dampaknya dapat menjalar ke inflasi impor, biaya produksi, dan kepercayaan pasar. Karena itu, strategi Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada stabilitas jangka pendek; ia harus membangun kedalaman industri, efisiensi logistik, kedaulatan pangan-energi, dan kemampuan teknologi yang lebih mandiri. ([Reuters](#))

Indonesia juga memiliki peluang yang nyata dalam ekonomi digital. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia termasuk di antara negara berpendapatan menengah dengan penggunaan AI generatif yang tinggi. Namun peluang ini hanya dapat diterjemahkan menjadi nilai tambah nasional bila disertai investasi pada konektivitas, pusat data, komputasi, talenta digital, dan data lokal yang berkualitas. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi pasar konsumsi digital yang besar tetapi lemah dalam posisi tawar strategis. ([World Bank](#))

9. Implikasi Kebijakan: Membangun Keseimbangan Baru

Dari seluruh pembahasan di atas, tampak bahwa dikotomi lama “negara versus pasar” tidak lagi memadai. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan baru. Negara harus cukup kuat untuk membangun kapasitas nasional, tetapi tidak boleh menutup ruang kompetisi dan kritik. Pasar harus cukup bebas untuk mendorong inovasi, tetapi tidak boleh dibiarkan memusatkan kekuasaan tanpa batas. Masyarakat harus cukup adaptif untuk hidup di era teknologi, tetapi tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri seluruh risiko transisi.

Implikasi pertama adalah pentingnya kebijakan industri yang disiplin. Dunia yang terfragmentasi memerlukan strategi sektoral, terutama pada pangan, energi, manufaktur strategis, kesehatan, dan ekonomi digital. Namun

kebijakan ini harus berbasis evaluasi kinerja, transparansi, dan kompetisi sehat. Negara tidak boleh hanya memilih pemenang; negara harus menciptakan ekosistem di mana produktivitas meningkat dan pembelajaran industri benar-benar terjadi.

Implikasi kedua adalah perlunya kontrak sosial baru untuk pasar tenaga kerja. ILO telah menunjukkan bahwa tantangan utama pasar kerja global adalah kualitas kerja dan pengangguran kaum muda. Maka fokus kebijakan tidak cukup pada penciptaan lapangan kerja dalam arti kuantitatif. Yang diperlukan adalah reskilling, jaminan transisi, perlindungan pekerja informal, peningkatan produktivitas UMKM, dan sistem perlindungan sosial yang dapat mengikuti fleksibilitas kerja baru. ([International Labour Organization](#))

Implikasi ketiga adalah menata ulang tata kelola digital. Pasar digital yang sangat terkonsentrasi menuntut regulasi persaingan, perlindungan data, interoperabilitas, serta tata kelola merger dan akses platform yang lebih adil. Temuan Bank Dunia bahwa enam perusahaan menghasilkan lebih dari 40 persen arus data internet global bukan sekadar fakta teknis; itu adalah fakta politik tentang siapa yang mengendalikan infrastruktur ekonomi masa depan. ([World Bank](#))

Implikasi keempat adalah memperlakukan demokrasi sebagai aset pembangunan, bukan hambatan pembangunan. Data V-Dem menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi adalah gejala global yang serius. Namun solusi atas ketidakpastian zaman bukanlah mengorbankan kebebasan sipil demi efisiensi semu. Yang dibutuhkan justru demokrasi yang lebih substantif: mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, komunikatif, dan adil. Tanpa itu, negara akan kehilangan kepercayaan publik, dan masyarakat akan semakin mudah terseret ke dalam polarisasi. ([v-dem.net](#))

10. Penutup

Dunia yang sedang berubah menuntut pembacaan ekonomi politik yang lebih tajam, lebih historis, dan lebih manusiawi. Kita tidak lagi hidup dalam era ketika pasar dapat dipahami hanya sebagai arena pertukaran bebas yang digerakkan oleh harga. Hari ini pasar dibentuk oleh tarif, konflik, data, algoritma, sanksi, kebijakan industri, dan sentimen geopolitik. Negara tidak lagi dapat berfungsi sekadar sebagai pengawas dari pinggir lapangan; ia harus bertindak strategis. Namun justru karena perannya membesar, tuntutan akan akuntabilitas dan legitimasi juga harus semakin kuat.

Makalah ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi global, konsentrasi kekuasaan digital, perlambatan pembangunan manusia, kerentanan pasar kerja, dan kemunduran demokrasi adalah bagian dari satu cerita besar yang sama. Cerita itu adalah cerita tentang perubahan relasi antara kekuasaan, pasar, dan masyarakat. IMF, WTO, UNDP, ILO, Bank Dunia, dan V-Dem, meskipun berbicara dari sudut yang berbeda, sama-sama memberi pesan bahwa dunia sedang memasuki fase baru yang lebih rapuh, lebih terpolarisasi, dan lebih sarat pilihan politik. ([IMF](#))

Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan mengubah pertumbuhan menjadi daya tahan nasional, mobilitas sosial, dan martabat institusional. Itu berarti memperkuat fondasi ekonomi domestik, mempercepat kapasitas teknologi, menata relasi negara-pasar dengan lebih adil, dan menjaga kualitas demokrasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia membutuhkan negara yang kuat tetapi tidak sewenang-wenang, pasar yang hidup tetapi tidak oligarkis, dan masyarakat yang dinamis tetapi tidak ditinggalkan.

Akhirnya, membaca ekonomi politik kontemporer adalah membaca pilihan-pilihan kita sendiri. Apakah perubahan dunia akan menghasilkan keteraturan baru yang lebih inklusif, atau justru memperdalam hierarki lama dalam bentuk digital dan geopolitik yang baru, sangat bergantung pada desain kebijakan, kualitas institusi, dan keberanian masyarakat untuk

menuntut pembangunan yang bukan hanya besar, tetapi juga adil dan bermakna.

Glosarium

Autokrasi

Sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada sedikit aktor dan membatasi kompetisi politik, kebebasan sipil, atau mekanisme akuntabilitas.

Demokrasi liberal

Bentuk demokrasi yang bukan hanya mengandalkan pemilu, tetapi juga rule of law, checks and balances, perlindungan hak sipil, dan kebebasan berekspresi.

Ekonomi digital

Keseluruhan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada data, jaringan internet, komputasi, platform digital, dan layanan berbasis perangkat lunak.

Ekonomi politik

Pendekatan analitis yang mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan, institusi, distribusi sumber daya, dan perilaku pasar.

Goeconomics

Penggunaan instrumen ekonomi seperti tarif, sanksi, kontrol ekspor, investasi, dan rantai pasok untuk mencapai tujuan strategis dan politik.

HDI (Human Development Index)

Indeks yang mengukur pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Hilirisasi

Strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan mengolah bahan mentah menjadi produk antara atau produk akhir di dalam negeri.

Ketidakpastian kebijakan perdagangan

Kondisi ketika pelaku ekonomi sulit memprediksi arah tarif, hambatan non-tarif, atau aturan perdagangan lain, sehingga menekan investasi dan perdagangan.

Komputasi (compute)

Kapasitas teknis untuk menjalankan AI dan layanan digital, termasuk chip, server, cloud, dan pusat data.

Konsentrasi pasar

Situasi ketika pangsa pasar, data, atau infrastruktur ekonomi penting dikuasai oleh sedikit perusahaan atau aktor.

Legitimasi

Tingkat penerimaan publik terhadap kewenangan institusi atau pemerintah sebagai sah, wajar, dan layak ditaati.

Perlindungan sosial

Rangkaian kebijakan untuk melindungi warga dari risiko kemiskinan, pengangguran, sakit, atau guncangan pendapatan.

Rantai pasok

Jaringan produksi, logistik, distribusi, dan perdagangan yang menghubungkan pemasok, produsen, dan konsumen.

Small AI

Aplikasi AI yang lebih terjangkau, lebih ringan, dan lebih mudah disesuaikan dengan konteks lokal, khususnya untuk negara berkembang.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.*

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent.*

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.*

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate held at 4.75%: Strengthening economic growth, maintaining stability.*

International Labour Organization. (2025). *Economic recovery is losing steam, new ILO report says.*

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025.*

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim.*

Reuters. (2026, April 6). *Middle East war means "all roads" lead to higher prices, slower growth, IMF chief says.*

Reuters. (2026, April 7). *Indonesia's central bank intervenes in FX market after the rupiah hits a record low.*

Reuters. (2026, April 7). *Central banks' concern over rising geopolitical tensions surges, survey shows.*

Reuters. (2026, April 7). *Trump will pursue stability with China's Xi in May meeting, USTR Greer says.*

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *AI's \$4.8 trillion future: UN Trade and Development alerts on divides, urges action.*

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI.*

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg.

World Bank. (2021). *Antitrust and digital platforms: An analysis of global patterns and approaches by competition authorities.*

World Bank. (2025). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations.*

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics, April 2025.*

Perkembangan terbaru terkait tema ini:

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d5e5ca-7bd0-839e-b4f0-487a01346053>